

**PERAN KOREM 083 BHALADIKA JAYA DALAM PEMBINAAN  
TERITORIAL DI WILAYAH PESISIR GUNA MENDUKUNG  
TERWUJUDNYA POROS MARITIM INDONESIA**

**THE ROLE OF 083<sup>TH</sup> MILITARY COMMAND RESORTS “BHALADIKA  
JAYA” IN DEFENSE TERRITORIAL MANAGEMENT PROGRAMS AT THE  
SEASHORE AREAS FOR REALIZING INDONESIA’S MARITIME-AXIS**

Priyanto<sup>1</sup>

Universitas Pertahanan

(priyantosuharto@gmail.com)

**Abstrak** - Presiden RI telah menggagas Indonesia sebagai poros maritim, dengan menggali kembali budaya maritim. Wilayah pesisir adalah daerah yang memiliki budaya maritim. Namun saat ini masih ada permasalahan di wilayah pesisir terhadap timbulnya konflik sosial. Kondisi itu mengindikasikan bahwa peran teritorial belum optimal. Oleh karenanya penelitian ini, akan menganalisa peran Korem 083 Bhaladika Jaya yang meliputi bagian timur dari Provinsi Jawa Timur, dalam melaksanakan pembinaan teritorial pada aspek budaya wilayah pesisir dalam mendukung terwujudnya poros maritim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peran Korem 083 Bhaladika Jaya yang dimulai dari peran pembinaan satuan di bidang intel, operasi dan personel belum akurat. Selanjutnya peran pembinaan teritorial program komando atas sudah akurat. Sedangkan peran pembinaan teritorial aspek budaya di wilayah pesisir belum akurat. Hal itu disebabkan karena pembinaan teritorial pada aspek budaya dengan unsur teknologi dan unsur kesenian belum terlaksana. Guna mengoptimalkan peran Korem perlu disarankan untuk mengatasi permasalahan yaitu 1) Apter belum memahami sebagai Bapulket; 2) kemampuan teritorial tidak sama; 3) Kekurangan personel; 4) Pembinaan pada unsur teknologi dan unsur kesenian belum terlaksana; 5) Masih ada rasa dendam akibat konflik sosial; 6) Sarana kelautan terbatas; 7) Penggunaan bom berdetonator untuk mencari ikan; 8) Dugaan peredaran narkoba dikalangan nelayan. Sehingga dengan mengeliminir temuan di atas. Diharapkan pembinaan teritorial di wilayah pesisir dalam rangka mendukung terwujudnya poros maritim Indonesia, sebagai bagian dari pertahanan semesta Indonesia akan lebih optimal.

**Kata kunci:** Peran Korem, Pembinaan Teritorial, Wilayah Pesisir

---

<sup>1</sup> Kolonel Arh Priyanto, S.I.P., M.Si (Han) alumnus Prodi SPS Fakultas Pertahanan, Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2015-2016.

**Abstract** - President of the Republic of Indonesia has announced, that Indonesia as a maritime-axis. For realizing that, Indonesia needs to raise again the Maritime Culture. The seashore area is part of mainland which has a link with the Maritime Culture. The issues that happened recently are about the changing of culture in that area. It causes the decreasing of fishermen's prosperity and sensitive of social conflict. Those situations are indicated that the role of the army territorial units did not work well. Basically, that role is a part of effort to maintenance the Indonesian Total Defense. Therefore, this research is about the role of the 083<sup>th</sup> Military Command Resorts "Bhaladika Jaya" which covers eastern part of East-Java Province and it is focused on the culture perspective in order to support maritime-axis program. The qualitative method has used in this research. As the results we have a knowledge regarding the role of 083<sup>th</sup> Military Command Resorts "Bhaladika Jaya". The result of the analyzing said that the activity of Intelligent Staff, Operational Staff, and Staff of Human Resources was not accurate yet. But the role of defense territorial management has been accurate. In other hand, the role defense territorial management which is focused in seashore areas was not accurate also, because the 083<sup>th</sup> Military Command Resorts "Bhaladika Jaya" did not conduct the programs of technology and art aspects at the seashore's community. Therefore, the Defense Territorial Management in seashore areas was not optimum. For improving the Defense Territorial Management in seashore areas, the 083<sup>th</sup> military command resorts "Bhaladika Jaya" needs to solve all the matters. Those matters as follow ; 1) many military personnel did not have knowledge as an intelligent agent; 2) Lack of capabilities; 3) Lack of personnel; 4) Technology and art aspects programs; 5) Social conflict ; 6) Lack of equipment; 7) The utilize of traditional bombs; 8) The issues of drugs. If they could solve all the matters in above, it will support Indonesia as a maritime-axis state. Finally, the strategy of Indonesian total defense as an outcome of this research will be optimum.

**Keywords:** Military Unit's role, defense territorial management, seashore area

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara maritim, menurut Suryanto (2016) dalam bukunya yang berjudul "Konsep Pertahanan Nonmiliter" dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang dihubungkan oleh lautan. Hal itu tentunya sebagai salah satu ciri sebuah negara berwawasan kemaritiman. Indonesia terletak juga diantara benua Asia dan Australia, serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi silang ini bukan saja hanya dilihat dari aspek

geografis saja. Melainkan juga terjadi persilangan dari berbagai aspek kehidupan, antara lain seperti aspek lalu lintas dan transportasi kelautan. Oleh karenanya, hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai poros atau pusat pertemuan dari berbagai aspek tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Djalal (2015) negara maritim memiliki arti sebagai negara yang mampu memanfaatkan laut.<sup>3</sup> Dengan kata lain, faktor geografis merupakan unsur yang berperan besar dalam pembentukan suatu

---

<sup>2</sup> Suryanto. "Konsep Sistim Pertahanan Nonmiliter". (Jakarta. Pustaka Obor Indonesia., 2016)

<sup>3</sup> Prof. Djalal "Geomaritim". (Jakarta: Badan Informasi Geospasial, 2014)

kebudayaan bangsa. Seperti yang dijelaskan juga oleh pakar kebudayaan Koentjaraningrat (2015) bahwa budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia didalam kehidupannya yang bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Dengan demikian budaya maritim adalah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang berhubungan dengan laut antara lain transportasi, perdagangan, perikanan, kehidupan penduduk pesisir, budaya kampung nelayan, seni, dan tradisi ritual laut. Sehingga untuk masyarakat pesisir, budaya yang berlaku merupakan budaya yang berhubungan dengan laut atau budaya maritim.<sup>4</sup>

Lebih lanjut dijelaskan dalam Buku Induk Pembinaan Teritorial 2006 bahwa obyek Pembinaan Teritorial antara lain adalah aspek budaya. Maka dari itu, di dalam merespon kondisi ini, telah muncul argumen mengenai Pembinaan Teritorial. Menurut Markum (2009) bahwa TNI AD dalam berpartisipasi membantu meningkatkan budaya bangsa harus

memilih isu strategis, di daerah yang belum mendapat perhatian dari pemerintah. Agar supaya di dalam Pembinaan Teritorial bisa terlaksana dengan optimal sangat membutuhkan dukungan masyarakat, yang merupakan *conditio sine qua non* (persyaratan mutlak yang menyebabkan suatu akibat).<sup>5</sup> Oleh sebab itu untuk melaksanakan Pembinaan Teritorial di wilayah pesisir diharapkan senantiasa berorientasi pada isu strategis. Dalam hal ini, isu strategis yang relevan adalah budaya maritim, yang juga merupakan fenomena dalam tulisan ini. Dengan demikian, Pembinaan Teritorial pada aspek budaya di wilayah pesisir merupakan bentuk partisipasi satuan TNI AD untuk mendukung terwujudnya poros maritim Indonesia.

Memperhatikan fenomena di atas, maka dapat dipahami bahwa Pembinaan Teritorial di wilayah pesisir memiliki ciri khas tersendiri. Kekhususan itu dikarenakan pola hidup budaya masyarakat pesisir cenderung berhubungan dengan laut atau Kemaritiman. Sehingga muncul permasalahan, di satu sisi Korem 083

---

<sup>4</sup> Prof. Koentjaraningrat.. “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”. (Jakarta, Gramedia, 2015)

---

<sup>5</sup> Markum. “Paradigma Baru Pembinaan Territorial TNI AD Dalam Menunjang Ketahanan Nasional”. (Jakarta, Universitas Indonesia, 2009)

Bhaladika Jaya belum memiliki kewenangan melaksanakan pembinaan masalah kelautan. Namun di sisi lain Pembinaan Teritorial harus tetap dilakukan karena pada dasarnya wilayah pesisir adalah wilayah daratan dan sekaligus juga merupakan implementasi dari tujuan Pembinaan Teritorial, yaitu untuk untuk mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dalam menghadapi ancaman kedaulatan negara. Sementara itu, telah ditegaskan pula bahwa Korem 083 Bhaladika Jaya sebagai bagian dari komponen utama pertahanan harus mengemban pelaksanaan Undang-undang Pertahanan. Dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan bahwa: “Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”. Dengan demikian Pembinaan Teritorial yang dilakukan oleh Korem 083 Bhaladika Jaya khususnya pada wilayah pesisir juga merupakan bentuk dukungan dalam mewujudkan pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan. Mencermati tentang aspek budaya dan pertahanan sebagai negara kepulauan, hal itu termasuk juga di

dalam lima pilar utama Poros Maritim yang telah di canangkan oleh Presiden RI.<sup>6</sup>

Korem 083 Bhaladika Jaya memiliki garis pantai atau wilayah pesisir yang panjang, yaitu sekitar 700 km dan merupakan pesisir yang padat aktifitas penduduknya serta dinamika budaya dan permasalahan yang ada sangat beragam. Adapun wilayah yang berada di bawah kewenangan Korem 083/BDJ meliputi: Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten dan kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Pasuruan.

Beberapa gejala kondisi yang mengkuatirkan pada masyarakat pesisir di wilayah Korem 083 Bhaladika Jaya yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan dan adanya kegiatan illegal di wilayah pesisir. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2015), tingkat kejahteraan nelayan di akhir 2014 menurun. Tingkat kesejahteraan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di wilayah pesisir, yang berprofesi sebagai nelayan.

---

<sup>6</sup> Parikesit. “Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim”. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2016 dari <http://www.tempo.com>.

Kondisi ini harus segera diatasi oleh pemerintah daerah setempat. Bila tidak segera ditanggulangi maka mengakibatkan, berkurangnya penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Jika hal itu terjadi dapat mengurangi derap maju perwujudan poros maritim. Sebab negara dapat dikatakan sebagai negara maritim apabila mampu mengelola potensi kelautan dan profesi nelayan adalah bagian pengelolaan potensi tersebut. Sementara itu peningkatan kesejahteraan juga harus dilakukan pemerintah daerah sesuai Pasal 1 Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa :

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”<sup>7</sup> Lebih lanjut dijelaskan oleh Purnomo (2014) bahwa ancaman yang bisa membahayakan negara dapat bersumber dari dalam negeri terutama terkait masalah ekonomi di masyarakat.<sup>8</sup>

Tindakan illegal yang terjadi di wilayah pesisir sebagai hal yang mempengaruhi wilayah pesisir adalah, seperti yang diungkapkan Widiyanto (2013) bahwa TNI AL telah memperketat



Gambar 1. Nilai Tukar Nelayan 2013-2014 Jawa Timur

Sumber: [jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id)

<sup>7</sup> Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Timur “Statistik nilai tukar nelayan Jawa Timur”. (Penerbit: Pemda Provinsi Jawa Timur. 2014)

pengamanan di wilayah perairan Jawa Timur sebab kawasan tersebut merupakan jalur rawan. Selanjutnya dalam pemberitaannya tersebut juga, telah menginformasikan adanya kegiatan pengiriman orang secara ilegal ke Australia melalui pantai di Jawa Timur. Tindakan ilegal ini sangat membahayakan bagi kedaulatan negara Indonesia. Sebab hal itu berpengaruh terhadap hubungan internasional kedua negara. Tidak saja adanya kegiatan ilegal maupun penurunan kesejahteraan, tetapi juga adanya potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah pesisir seperti misalnya di wilayah Kecamatan Puger, Jember Selatan. Menurut Ferdinand (2013) bahwa konflik sosial di wilayah pesisir merupakan bahaya laten yang dapat timbul sewaktu-waktu. Dengan demikian perlu pemahaman tentang karakteristik budaya pesisir agar konflik bisa dihindari. Merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan di atas, bahwa wilayah pesisir masih terjadi tindakan ilegal penyelundupan orang, kerusuhan sosial dan menurunnya kesejahteraan nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa Pembinaan Teritorial di wilayah pesisir masih belum optimal. Dari uraian di atas maka dapat

disusun rumusan masalah adalah bagaimana peran korem 083 bhaladika jaya melalui pembinaan teritorial di wilayah pesisir dalam rangka mendukung terwujudnya poros maritim indonesia?

### **Metodologi**

Menurut Creswell (2014) dalam melaksanakan penelitian dengan gagasan filosofis konstruksivisme-sosial adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.<sup>9</sup> Lebih lanjut Sugiono (2011) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah sebab penelitian dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya melalui teknik memperoleh data juga saat analisa dilaksanakan secara kualitatif. Penelitian seperti ini dimanfaatkan agar memperoleh data secara lengkap, yakni kondisi data yang memiliki arti. Makna atau arti itu sebagai data yang nyata.

### **Teori Peran**

Teori peran Kreitner dan Knicki (2014) dalam menganalisa peran, perlu ditelusuri proses peran itu sendiri. Proses itu diawali dari episode peran yaitu terjadinya situasi dimana berlangsung interaksi antara pemberi peran dan penerima peran dalam

---

<sup>9</sup> Creswell, John. "Research design". (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2014)

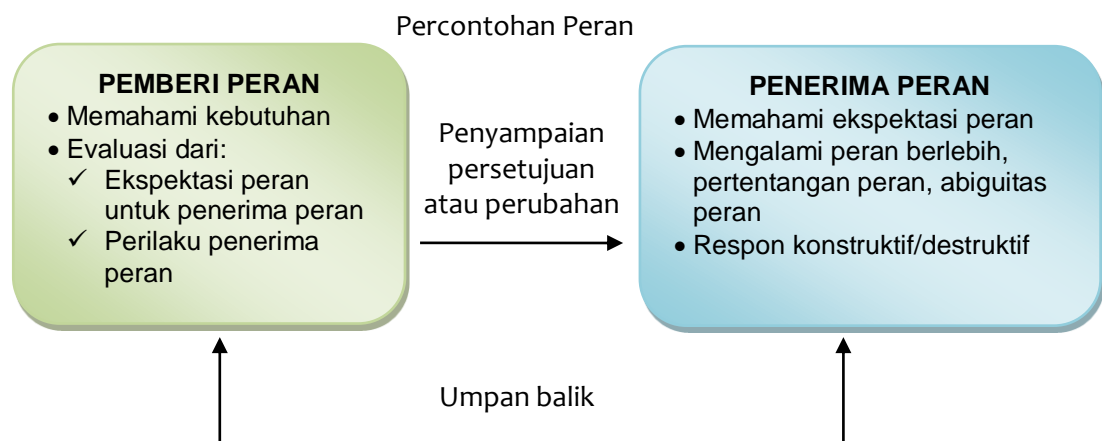
organisasi. Kemudian posisi penerima peran akan menerima peran itu dengan akurat atau tidak akurat sesuai ekspektasi pemberi peran. Respon dari penerima peran apabila muncul bila tidak akurat adalah adanya berbagai kombinasi peran berlebih, pertentangan peran, dan ambiguitas peran.<sup>10</sup>

Dengan demikian dalam penelitian tentang peran Korem 083 Bhaladika Jaya melalui pembinaan teritorial di wilayah pesisir, dimana dalam penelitian ini akan dibatasi hanya pada satuan Korem. Oleh karenanya dalam menganalisa peran Korem 083 Bhaladika Jaya melalui pembinaan teritorial di wilayah pesisir ,akan didasari

pasal 5 undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 tentang peran TNI, dan juga tugas pokok dan fungsi Korem 083 Bhaladika Jaya dalam pembinaan teritorial di masyarakat wilayah pesisir.

### Teori Dasar Tentang Budaya

Kuntjaraningrat (2009) berpendapat bahwa “Budaya” berasal dari kata sansekerta *buddhayah* bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya budaya dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, Dari hal di atas memunculkan sutu tindakan yang selanjutnya dibiasakan secara berkelanjutan. Cara hidup manusia dengan



**Gambar 2** Episode Peran

Sumber: Kreitner dan Knicki (2014)

<sup>10</sup> Kreitner and Kruichi. “Perilaku Organisasi”. (Jakarta Alvabeta,2014)

sistem tindakan itu menjadi konsep kebudayaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu:

- a. Wujud sistem budaya sifatnya Abstrak,
- b. Wujud sistem sosial bersifat konkret, dapat diamati atau diobservasi.
- c. Wujud kebudayaan fisik adalah berbagai penggunaan peralatan dan sebagai hasil karya manusia untuk mencapai tujuannya.<sup>11</sup>

### Konsep Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Menurut Naskah Sementara Pemberdayaan wilayah pertahanan Tahun 2005, pemberdayaan wilayah pertahanan adalah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Hal ini dilakukan melalui pembinaan potensi nasional dalam rangka membantu pemerintah. Wilayah Indonesia meliputi daratan, lautan dan udara dengan luas 9.800.000 km<sup>2</sup> . Terdapat ratusan etnis, dengan pulau-pulau besar dan



Gambar 3 Kerangka budaya

Sumber: Koentjaraningrat (2009)

<sup>11</sup> Koentjaraningrat. "Ilmu antropologi". (Jakarta: PT.Asdi Mahastya,2009)



rangkaian pulau kecil jumlahnya 17.499 pulau, serta pada posisi silang antara; benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan memiliki sumber daya alam yang besar. Kondisi geografi yang sedemikian kompleks harus dapat disinergikan, sehingga menjadi kondisi yang mampu melakukan pertahanan negara pada setiap daerahnya. Dihadapkan dengan permasalahan geografis seperti ini maka perlu dibentuk wilayah-wilayah pertahanan yang dapat melaksanakan pertahanan dan mampu memberikan dukungan satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, konotasi dari kesiapan pertahanan negara mengandung esensi adanya pembinaan yang dilakukan oleh jajaran satuan kewilayahan sebagai substansi kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Adapun tujuan pemberdayaan tersebut adalah mensinergikan peran instansi fungsional dalam membina sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana, nilai-nilai, teknologi dan dana menjadi kekuatan

kewilayahan yang tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan.<sup>13</sup>

Sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor SKEP/455/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005 pelaksanaan

pemberdayaan wilayah pertahanan yaitu;

- a. Memberdayakan lembaga fungsional
- b. Membangun sistem perencanaan pembinaan dan pembangunan potensi nasional
- c. Memberdayakan wilayah pertahanan di daerah secara terencana dan berkesinambungan.

### **Konsep Negara Maritim**

Sebagai negara yang memiliki budaya maritim, maka Indonesia dapat dikatakan sebagai negara maritim. Ditegaskan oleh Djalal (2015) bahwa dalam mengembalikan kejayaan sebagai poros maritim maka Indonesia harus mengedepankan strategi pembangunan Negara Maritim. Sebagai sebuah wilayah maritim memiliki kriteria:

- a. Berdaulat di wilayah NKRI dan memiliki “sea power” yang diandalkan secara nasional dan global;

---

<sup>12</sup> Subandono “Membangun poros maritim dunia dalam perspektif tata ruang laut”. (Jakarta, Direktorat Perencanaan Tata Ruang Laut,(2015)

---

<sup>13</sup> Surat Keputusan Panglima TNI Nomor SKEP/455/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005 pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan

- b. Mampu mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi pembangunan maritim sesuai aturan nasional dan internasional;
- c. Memanfaatkan maritim untuk menghasilkan kemakmuran bagi segenap masyarakat diwilayah dan di Indonesia secara umum.

Dengan demikian maka keterpaduan darat dan laut dalam pembangunan harus menjadi dasar spasial serta berorientasi pada wawasan nasional maupun global dengan mengutamakan kepentingan nasional. Perspektif pembangunan negara maritim juga didasari bahwa keberlanjutan pembangunan masyarakat guna mencapai keberlanjutan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu peran Korem 083 Bhaladika Jaya melalui pembinaan teritorial pada di wilayah pesisir dalam rangka mendukung terwujudnya poros maritim Indonesia.<sup>14</sup>

### **Regulasi tentang Wilayah Pesisir**

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat

dan laut. Dalam pengelolaan wilayah pesisir perlu dilakukan secara terintegrasi.<sup>15</sup> Kondisi alam yang unik dari wilayah pesisir secara umum membutuhkan perhatian yang serius untuk penanganannya. Pemahaman secara menyeluruh tentang wilayah ini perlu dibangun secara terintegrasi baik dalam pendekatan pemberdayaannya maupun untuk perencanaan pembangunannya. Oleh karenanya perlu memperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Menurut Robert Key (2009) pembangunan wilayah pesisir perlu memperhatikan keseimbangan antara:

- a. Pengembangan ekonomi dan manfaat wilayah pesisir
- b. Perlindungan dan Pelestarian wilayah pesisir
- c. Minimalisasi kerugian orang dan harta benda
- d. Kemudahan akses bagi masyarakat di wilayah pesisir

Kewenangan pengelolaan wilayah pesisir diwujudkan dalam pengaturan tata ruang Undang-undang Nomo 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional dan Undang-undang 27 Tahun 2007 Jo Undang

---

<sup>14</sup> Djalal "Geomaritim". (Jakarta, Badan Informasi Geospasial, 2014)

Nomor 1 tahun 2014. .Mencermati tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir. Maka dalam penelitian ini yang menjadi batasan dalam penelitian adalah batas wilayah kecamatan. Hal ini dikarenakan bahwa batas Korem 083 adalah juga batas Koremil. Demikian juga sesuai petunjuk teritorial dijelaskan bahwa wilayah Koramil adalah sama dengan wilayah kecamatan binaannya. Sesuai ilustrasi dibawah ini. <sup>16</sup>

## Pembahasan

Pada pembahasan ini, diuraikan tentang peran Korem 083 Bhaladika Jaya dalam Pembinaan Teritorial di wilayah pesisir dalam mendukung terwujudnya poros maritim Indonesia. Mencermati tentang hasil analisis data, maka telah diperoleh keterangan bahwasanya peran Korem dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial perlu dibahas secara utuh baik peran dalam pembinaan satuan, peran dalam Pembinaan



**Gambar 4.** Kewenangan tata ruang

Sumber : Subandono (2015)

<sup>16</sup> Undang-undang Nomo 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional dan Undang-undang 27 Tahun 2007 Jo Undang Nomor 1 tahun 2014.

Teritorial dan peran yang difokuskan pada wilayah pesisir. Hal ini disebabkan peran-peran tersebut saling terkait serta saling mendukung dalam mencapai tugas pokok Korem 083 Bhaladika Jaya.

Teori peran *Kreitner* dan *Knicki* (2014) menjelaskan bahwa definisi peran adalah tatanan perilaku dalam suatu posisi dan peran terjadi karena interaksi antara pemberi peran dan penerima peran dalam organisasi. Dalam memahami tentang pemberi peran dianalogikan bahwa hal itu adalah satuan di atas Korem 083 Bhaladika Jaya yaitu Kodam V Brawijaya dan juga pemberi peran muncul karena adanya kedudukan serta posisi tertentu. Hal ini mengandung pengertian bahwa peran Korem 083 Bhaladika Jaya juga didapat sesuai fungsinya yaitu melaksanakan Pembinaan Teritorial. Pada Konsep Binter Korem 083 Bhaladika Jaya adalah untuk mewujudkan RAK juang yang tangguh. Selanjutnya Pembinaan Teritorial juga berfungsi untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini sesuai yang dicanangkan oleh Presiden RI

selaku Kepala Pemerintahan yaitu untuk mewujudkan poros maritim Indonesia.<sup>17</sup>

### **Peran Korem 083 Bhaladika Jaya dalam pembinaan satuan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan kegiatan pembinaan satuan telah dilaksanakan dalam tugas masing-masing staf Korem. Staf intel korem 083 memiliki peran untuk memberikan informasi dari berbagai wilayah di jajaran korem 083 Bhaladika Jaya guna memberikan masukan kepada Danrem sehingga dapat mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan di wilayahnya. Tugas ini merupakan kebutuhan yang menjadi standar dari ekspektasi peran staf intel. Dari hasil penelitian masih terdapat kendala yaitu tentang belum seluruh aparat teritorial memiliki pengetahuan sebagai Badan Pengumpul Keterangan. Dengan demikian staf intelrem belum mencapai standar yang diharapkan dari pemberi peran. Mendasari teori peran bahwa ketidaksesuaian standar disebut belum akurat.

Staf operasi korem 083 Bhaladika Jaya sebagai penerima peran memiliki

---

<sup>17</sup> Markas Besar TNI AD (2006). "Petunjuk induk teritorial TNI AD". Penerbit: Staf Teritorial TNI AD.

standar. Kebutuhan yang merupakan standar yaitu untuk meningkatkan kualitas latihan secara efektif dan efisien dalam memelihara kesiapan satuan dan penguasaan keterampilan teknis Pembinaan Teritorial. berdasarkan data hasil penelitian bahwa kondisi aparat teritorial yang baru memiliki pengetahuan yang terbatas dalam Pembinaan Teritorial. sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian dalam pelaksanaan latihan. Masalah itu telah menjadi kendala bagi staf operasi korem 083 Bhaladika Jaya dalam memberikan penguasaan keterampilan teknis Pembinaan Teritorial. Memperhatikan hal tersebut maka standar yang diharapkan dari peran staf operasi belum akurat.

Staf personel Korem 083 Bhaladika Jaya memiliki standar. Sesuai dengan sasaran yang harus dicapai, mendasari penjelasan oleh Kasipers Korem 083 Bhaladika Jaya adalah untuk memberikan perimbangan kekuatan satuan jajaran korem 083 Bhaladika Jaya. Kekuatan yang dimaksud adalah pada jabatan Babinsa. Mencermati penjelasan Kasrem 083 Bhaladika Jaya bahwa masih terdapat kekurangan personel 30 % dari kebutuhan

yang diharapkan. Sehingga terjadi untuk satu orang Babinsa membina lebih dari satu desa. Kondisi mencerminkan bahwa standar dalam melaksanakan peran pembinaan personel belum dapat tercapai dan belum akurat.

Staf logistik Korem 083 Bhaladika Jaya menurut penyampaian Kasrem 083 memiliki standar yang harus dicapai. Lebih lanjut disampaikan bahwa peran yang harus dilaksanakan adalah menyelenggarakan dan pengelolaan anggaran melalui DIPA. Hal ini tentunya dimaksudkan supaya anggaran tersebut dapat mendukung kegiatan Pembinaan Teritorial yang diselenggarakan oleh Korem 083 Bhaladika Jaya dan satuan Kodim jajaran. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya permasalahan yang menjadi kendala dibidang logistik. Oleh karenanya, staf logistik telah mencapai standar yang diharapkan.

Merujuk dari teori peran, maka dalam pembinaan satuan staf intel masih belum akurat yang diakibatkan pemahaman tentang Bapulket belum terpenuhi. Staf operasi dikarenakan kemampuan anggota yang baru belum sesuai yang diharapkan sehingga memerlukan pelatihan. Hal ini

menunjukkan bahwa masih belum akurat. Sedangkan pada staf personel ketidakakuratan diakibatkan belum terpenuhinya kekuatan personel terutama pada jabatan babinsa. Keakuratan staf logistik telah

dapat dibuktikan dengan tidak adanya permasalahan terkait dengan dukungan anggaran bagi pelaksanaan program Pembinaan Teritorial.

**Tabel 2.** Peran Dalam Pembinaan Satuan

BIDANG	STANDAR	PENCAPAIAN	EKSPEKTASI
<b>Intel</b>	mewujudkan tugas bidang intel dan pengamanan mendukung keberhasilan tugas pokok.	Terkendala badan pengumpul keterangan belum dapat terlaksana	Belum akurat
<b>Operasi</b>	meningkatkan kualitas latihan dan penguasaan keterampilan Binter	Terkendala terbatasnya pengetahuan teritorial	Belum akurat
<b>Personel</b>	Melaksanakan keseimbangan kekuatan satuan kowil jajaran untuk jabatan Babinsa	Terkendala Jabatan Babinsa baru terpenuhi 70%	Belum akurat
<b>Logistik</b>	Melaksanakan pengelolaan anggaran melalui DIPA.	Sesuai dengan peruntukannya dalam DIPA	akurat

Sumber : Peneliti (2016)

### **Peran dalam Pembinaan Teritorial wilayah pesisir aspek budaya**

Sementara itu, Korem 083 Bhaladika Jaya seperti yang dijelaskan diatas bahwa tuntutan ekspektasi peran tidak saja berasal dari Kodam V Brawijaya selaku pemberi peran. Pemberi peran juga timbul karena Korem 083 Bhaladika Jaya memiliki posisi tertentu di masyarakat. Hal ini sesuai dengan definisi peran dari *Kreitner* dan *Knicki* (2014) bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari posisi tertentu. Oleh karenanya pemberi peran adalah rakyat. Pencanangan poros maritim Indonesia oleh Presiden Joko Widodo merupakan refleksi dari harapan rakyat. Dimana sebagai pilar pertama adalah membangkitkan kembali budaya maritim. Sehingga Korem 083 Bhaladika Jaya berupaya untuk melaksanakan ekspektasi dari masyarakat itu dengan menjabarkan Pembinaan Teritorial kedalam unsur-unsur budaya. Dari unsur budaya yang telah disampaikan sebelumnya, merupakan sebuah lingkaran kerangka budaya yang utuh dari suatu komunitas. Memperhatikan tentang unsur budaya itu, maka peran dalam Pembinaan Teritorial di wilayah pesisir dapat ditinjau kesesuaiannya dengan unsur tersebut.

a. Unsur organisasi sosial yang menjadi sorotan Korem 083 Bhaladika Jaya adalah organisasi nelayan dan lembaga swadaya masyarakat. Pada unsur ini telah dilaksanakan komunikasi sosial secara terus menerus. Sehingga organisasi sosial itu berjalan sesuai fungsinya. Dengan demikian organisasi dapat memberikan kontribusi positif mengenai indikasi permasalahan yang muncul di wilayah pesisir. agar dapat diambil langkah preventif.

b. Unsur pengetahuan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan kawasan pesisir menurut hasil data Badan Pusat statistik Jawa Timur (2014) merupakan kawasan yang tingkat kesejahteraan rendah. Oleh karenanya diharapkan dengan melalui pendidikan akan memberikan wawasan pengetahuan termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kegiatan yang dilakukan adalah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengentasan buta aksara. Kegiatan pendidikan bela negara untuk nelayan juga dilakukan bekerja sama dengan Lanal dan Polres setempat.

c. Unsur ekonomi yang dilaksanakan oleh Korem 083 Bhaladika Jaya adalah dengan menyelenggarakan ketahanan pangan. Dimana untuk wilayah pesisir dilakukan kepada pengelolaan sumber daya kelautan. Karena pada dasarnya kebutuhan pangan tidak saja bersumber dari wilayah darat namun juga hasil perikanan laut menjadi bagian dari ketahanan pangan. Peningkatan kesejahteraan juga terkait dengan aspek ekonomi. Korem 083 Bhaladika Jaya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melaksanakan program renovasi rumah tidak layak huni di kawasan pesisir sebanyak 2.700 unit rumah.

d. Unsur religi merupakan keyakinan yang sangat kuat di pesisir wilayah Korem 083 Bhaladika Jaya. Kegiatan yang dilakukan pada unsur ini adalah dengan menjalin kerjasama dalam FKUB. Forum ini merupakan wadah antar tokoh agama di wilayah dalam kerangka menjaga kerukunan umat beragama.

e. Unsur Bahasa sebagai bagian dari budaya di wilayah pesisir telah menjadi perhatian bagi Korem 083 Bhaladika Jaya. Kawasan Pesisir mayoritas adalah penduduk yang mempergunakan Bahasa Madura. Oleh karenanya telah dihimbau

agar dalam slogan slogan dan istilah yang dipergunakan untuk mengajak masyarakat di wilayah pesisir supaya menggunakan Bahasa daerah. Hal ini dilakukan oleh Korem 083 Bhaladika Jaya untuk melestarikan bahasa daerah.

f. Untuk unsur teknologi dan unsur kesenian tidak didapat data pada hasil penelitian, yang pernah dilakukan oleh Korem 083 Bhaladika Jaya. Mencermati unsur tersebut merupakan unsur yang perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan unsur teknologi menunjukkan tingkat peradaban suatu Komunitas (Koentjoroningrat, 2009) . Sedangkan unsur kesenian wilayah pesisir adalah perwujudan nyata dari budaya kemaritiman (Fischer, 1957). Oleh karenanya kegiatan itu seharusnya dilaksanakan dalam rangka menggali kembali budaya Indonesia sebagai bangsa maritim.

Dari hasil analisis data telah ditemukan beberapa kendala yang sangat berpengaruh dalam Pembinaan Teritorial di wilayah pesisir. Adanya keterbatasan sarana dari pihak aparat teritorial. Hal ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas di wilayah pesisir maupun dalam menghadapi permasalahan seperti kecelakaan di laut,



maupun hal lain yang membutuhkan sarana komunikasi. Keterbatasan ini dapat menurunkan ekspektasi masyarakat terhadap peran yang diharapkan. Sehingga mengakibatkan masyarakat pesisir tidak yakin terhadap aparatnya. Situasi ini tentunya perlu perhatian yang serius dari Korem 083 Bhaladika Jaya. Penggunaan *bondet* menjadi permasalahan tersendiri. Karena mengapa, bom ikan dapat merusak ekosistem laut, kerusakan terumbu karang dan mematikan ikan-ikan kecil. Namun menurut pandangan nelayan penggunaan ini efektif karena dengan waktu singkat bisa mendapat hasil ikan yang banyak. Pemahaman ini jika tidak di eliminir dapat mengurangi hasil ikan di wilayah pesisir. Terlebih pernah ditemukan adanya penggunaan detonator untuk bom ikan. Aparat korem 083 Bhaladika Jaya perlu mewaspada hal itu, dan juga keahlian memproduksi bom ikan rawan terhadap pengaruh negatif serta dipergunakan untuk aksi-aksi teror.

Adanya rasa dendam akibat konflik sosial yang disebabkan masalah agama, penambangan liar, limbah perbedaan

aturan penangkapan ikan, dan masalah permodalan. Kondisi ini dihadapkan dengan perilaku masyarakat pesisir yang keras. Menjadikan sangat mudah terpicu untuk terjadi perselisihan antara mereka. Korem 083 Bhaladika Jaya perlu untuk melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat pesisir agar konflik dapat dicegah. Untuk alasan menjaga stamina pada saat melaut banyak para nelayan mengkonsumsi narkoba. Hal ini sangat membahayakan bagi masyarakat pesisir. Oleh karenanya, upaya yang tegas dalam mengatasi masalah ini segera harus dilakukan secara terintegrasi dengan aparat terkait. Untuk mempermudah pemahaman dari uraian diatas, tentang ekspektasi rakyat dalam Pembinaan Teritorial wilayah pesisir.

**Tabel 2 .Pembahasan Pembinaan Teritorial wilayah Pesisir (Sumber: Peneliti, 2016)**

PERAN	STANDAR	PENCAPAIAN	EKSPEKTASI
Pembinaan Teritorial Aspek Budaya wilayah pesisir	Terselenggaranya pembinaan religi	kerjasama dalam FKUB menjaga kerukunan umat beragama.	Dari 7 Aspek telah terlaksana 5 Aspek Hal ini menunjukkan Korem memiliki kemampuan untuk mencapai ekspektasi yang diharapkan. Dengan melaksanakan aspek budaya yang belum terlaksana serta mengeliminir kendala: - Sarana terbatas - Rasa dendam akibat konflik - Penggunaan <i>bondet</i> - masalah narkoba
	Terselenggaranya pembinaan unsur organisasi sosial.	Pembinaan organisasi nelayan dan lembaga swadaya pengawas lingkungan secara terus menerus	
	Terselenggaranya pembinaan unsur sistim ekonomi	ketahanan pangan wilayah pesisir dilakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan program renovasi RTLH di kawasan pesisir 2.700 unit rumah	
	Terselenggaranya pembinaan unsur Pendidikan	Kegiatan pengentasan buta aksara. dan pendidikan bela negara untuk nelayan	
	Terselenggaranya pembinaan Bahasa	Himbauan agar dalam slogan dan istilah dalam bahasa daerah	
	pembinaan unsur Sistim teknologi	Belum terlaksana	
	Terselenggaranya pembinaan unsur kesenian	Belum terlaksana	

## Simpulan

Peran Korem 083 Bhaladika Jaya dalam melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah pesisir dalam rangka mendukung terwujudnya poros maritim Indonesia masih belum optimal. Hal ini didasari dari pembahasan dalam peran pembinaan satuan dilakukan oleh masing-masing staf Korem sesuai bidangnya. Peran dalam pembinaan wilayah pesisir pada aspek budaya dalam mendukung poros maritim Indonesia. telah dijabarkan dengan menggunakan teori budaya dari Koentjaraningrat (2009) yang menjelaskan tentang kerangka budaya. Unsur-unsur dalam kerangka budaya adalah religi, sistim ekonomi, sistim teknologi, kesenian, bahasa, dan organisasi sosial. Terkait dengan unsur religi telah dilaksanakan kegiatan pembinaan melalui forum kerukunan umat bergama. Untuk unsur organisasi sosial dilaksanakan pembinaan terhadap LSM pengawas lingkungan dan organisasi himpunan nelayan. Dalam pembinaan unsur ekonomi telah diupayakan peningkatan kesejahteraan dengan renovasi rumah tidak layak huni di wilayah pesisir dan kegiatan ketahanan pangan pada sektor perikanan laut. Unsur

pendidikan diselenggarakan bersama kantor Dikbud dalam program pemberantasan buta aksara dan pendidikan bela negara untuk nelayan. Himbauan menggunakan Bahasa daerah untuk istilah dan slogan di wilayah pesisir merupakan pembinaan unsur Bahasa. Sedangkan unsur teknologi dan unsur kesenian belum terlaksana. Mengingat kerangka budaya merupakan lingkaran yang utuh yang terdiri atas unsur unsur maka dengan tidak dilaksanakan kegiatan yang menyentuh kedua unsur itu, maka pembinaan teritorial di wilayah pesisir aspek budaya tidak akurat. Hal ini juga adanya permasalahan yaitu sarana yang dimiliki terbatas, masih ada rasa dendam antar warga akibat konflik, penggunaan *bondet* dan masalah narkoba. Dengan demikian peran tersebut tidak optimal.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, untuk lebih mengoptimalkan pembinaan teritorial di wilayah pesisir dalam rangka mendukung terwujudnya poros maritim Indonesia, mengingat bahwa penelitian ini memiliki kekuatan didalam menemukan permasalahan dalam pembinaan teritorial pada aspek budaya kemaritiman. Oleh karenanya untuk

meningkatkan kemampuan Korem dalam melaksanakan pembinaan teritorial, maka perlu direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Korem 083 Bhaladika Jaya dalam mendukung terwujudnya poros maritim agar menyelenggarakan pembinaan pada unsur teknologi di lingkungan nelayan pesisir. Para aparat teritorial perlu dilatihkan sebelumnya tentang pemanfaatan teknologi bagi masyarakat pesisir. Mengingat bahwa teknologi adalah cerminan dari tingkat peradaban manusia. Semakin tinggi teknologinya maka semakin maju bangsa itu. Oleh karenanya perlu menjalin kerjasama dengan Instansi Kelautan, Unit Kantor Perikanan organisasi nelayan dan tokoh masyarakat untuk mencari cara dalam memajukan teknologi. Sehingga kesejahteraan nelayan akan meningkat.
- b. Pembinaan terhadap unsur kesenian di wilayah pesisir perlu dilaksanakan oleh Korem 083 Bhaladika Jaya dalam mendukung kelestarian budaya maritim. Kerjasama dengan Pemerintah daerah untuk menggelar even seni sedapat mungkin di inisiasi oleh Korem dan jajarannya. Demikian juga melalui peran komunikasi sosial kreatif hal itu juga bisa

dilaksanakan dengan memanfaatkan momen Hari Nasional maupun hari kebesaran agama. Sehingga Korem akan berperan aktif didalam memelihara dan menjaga kelestarian kesenian di pesisir.

- c. Satuan jajaran Korem 083 Bhaladika Jaya khususnya yang berada di wilayah pesisir perlu mengantisipasi keterbatasan sarana kelautan. Hal ini dikarenakan selaku aparat tidak bisa tinggal diam bila terjadi musibah di laut. Oleh karena itu untuk mengatasi keterbatasan perlu melakukan pembentukan Badan SAR Swakarsa yang dibentuk secara mandiri di wilayah pesisir dengan menggunakan kapal masing-masing. Demikian juga pembinaan terhadap organisasi radio amatir seperti ORARI harus di intensifkan. Sehingga bila terjadi sesuatu musibah organisasi itu akan secara otomatis mendukung dan membantu untuk mengatasi situasi tersebut. Di sisi lain juga mendorong partisipasi pemerintah daerah untuk membantu melengkapi kebutuhan sarana dari aparat teritorial.
- d. Adanya dugaan maraknya penggunaan narkoba dikalangan nelayan dengan

dalih untuk menjaga stamina pada saat mencari ikan. Hal itu perlu menjadi perhatian aparat teritorial Korem 083 Bhaladika Jaya. Mengingat bahwa bahaya narkoba dapat merusak budaya dan kehidupan masyarakat pesisir. Untuk itu perlu menggalakan gerakan anti narkoba yang melibatkan instansi swasta, pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat bekerja sama dengan pihak kepolisian. Penguatan intelijen perlu dilakukan untuk mendeteksi tentang narkoba. Penguatan tersebut dengan memberikan pembekalan terhadap aparat intel tentang masalah narkoba. Sehingga mampu secara terintegrasi dengan Polres setempat memberantas narkoba di wilayah pesisir.

e. Adanya penggunaan bom ikan (bondet). Keterbatasan dalam pengawasan dan dampak narkoba telah mendorong beberapa nelayan untuk mencari keuntungan dengan mudah dan cepat, sehingga mereka menggunakan bom. Penggunaan bom akan merusak ekosistem dilaut. Bom yang digunakan sudah tidak lagi secara tradisional tapi telah mulai menggunakan detonator hal ini tentunya sangat rawan bila

dipengaruhi terorisme sehingga digunakan dalam aksi-aksi teror. Oleh karenanya satuan Korem 083 harus bekerja sama dengan aparat TNI AL, Polres dan pemerintah daerah untuk meniadakan penggunaan bom ikan tersebut. Berbagai penyuluhan dan penyadaran tentang pentingnya ekosistem serta rasa bela negara harus dilakukan. Demikian juga razia dan pemeriksaan yang detail terhadap wilayah, desa, kapal dan lainnya yang terindikasi adanya penggunaan bom ikan, sebisa mungkin dilaksanakan secara terpadu. Dengan demikian kelestarian alam dan pencegahan terhadap pengaruh terorisme dapat dilakukan dengan optimal.

f. Masih terdapat rasa dendam antar nelayan akibat konflik sosial. Mengingat dalam setiap peristiwa tersebut telah menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Aparat teritorial perlu melakukan pembinaan teritorial komunikasi sosial dan pemberdayaan unit intel untuk deteksi dini kemungkinan terjadi konflik.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Arikunto (2013) “*Prosedur Penelitian*”. Jakarta; PT Rineka Cipta

- Burhan (2001) *“Metodologi Penelitian Sosial”*. Surabaya; Airlangga University Press.
- Emzir (2010) *“Metodologi penelitian kualitatif”* Jakarta; PT.Raja Grafindo
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2014) *“Statistik nilai tukar nelayan Jawa Timur”*. Penerbit: Pemda Provinsi Jawa Timur.
- Creswell, John (2014). *“Research design”*. Jakarta; Pustaka Pelajar
- Djalal (2014) *“Geomaritim”*. Jakarta: Badan Informasi Geospasial
- Kreitner and Kruichi (2014). *“Perilaku Organisasi”*. Jakarta; Alfabeta
- Koentjaraningrat. (2015). *“Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”*. Jakarta: Gramedia
- Koentjaraningrat. (2009). *“Ilmu antropologi”*. Jakarta: PT.Asdi Mahastya
- Markas Besar TNI AD (2006). *“Petunjuk induk teritorial TNI AD”*. Penerbit: Staf Teritorial TNI AD.
- Mabes TNI. (2012). *“Doktrin Peremberdayaan wilayah pertahanan”*. Penerbit; Staf teritorial Mabes TNI
- Purnomo (2014) *“Ekonomi Pertahanan”*. Jakarta PT.Gramedia
- Prabowo. (2009). *“Perang Semesta”*. Jakarta: PPSN
- Riant (2014). *“Metodologi Penelitian”*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Subandono (2015) *“Membangun poros maritim dunia dalam perspektif tata ruang laut”*. Jakarta;Direktorat Perencanaan Tata Ruang Laut.
- Sugiyono (2011) *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Bandung; Alfabeta CV.
- Setyawan (2012). *“Pengertian dan Konsep Dasar Kebudayaan”* Jakarta: ISBD
- Sulaeman, M. (2012). *“Ilmu Budaya Dasar: Pengantar ke Arah Ilmu Sosial Budaya Dasar”*. Bandung. Refika Aditama.
- Steven (2004) *The Seven Habits of Highly Effective People*. USA:Timboon P-12 School
- Suryanto (2016) *Konsep Sistim Pertahanan Nonmiliter*. Jakarta; Pustaka Obor Indonesia.
- Tunas (2010). *“Memahami Dan Memecahkan Masalah Dengan Pendekatan Sistem”*. Jakarta: PT Nimas Ultima
- Jurnal**
- Anwar (2016) *“Territorial of Navy Aspect”* Paper presented at the lecturing of total war study program. Indonesian Defense University.
- Markum (2009) *“Paradigma Baru Pembinaan Territorial TNI AD Dalam Menunjang Ketahanan Nasional”*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nugroho (2015) *“Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Di Wilayah Pesisir Pantai”*. Pasuruan: Jurnal Teknologi Pangan Januari 2015
- Purwanti dan Wulandari (2013) *“Gaya Hidup Masyarakat Nelayan”*. Jember: Jurnal Universitas Jember (UNEJ).
- Wahyudin (2015) *“Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Pesisir”*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Zuhdi (2011). *“Budaya Maritim, Kearifan Lokal dan Diaspor”* Buton. Jakarta: Universitas Indonesia
- Undang-Undang**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009  
tentang Kesejahteraan Sosial  
Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007  
tentang Tata Ruang  
Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2007  
tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-  
pulau Terluar  
Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Kelautan.

#### **Website**

Ferdinand (2013) “Konflik Puger Jember  
Bahaya Laten Yang-Bisa Meledak  
Sewaktu-Waktu”. Diunduh tanggal 15  
Desember 2015 dari  
[http://www.tribunnews.  
com/regional/2013/09/14](http://www.tribunnews.com/regional/2013/09/14)

Humas Polres (2016) “Nelayan Muncar  
Tertangkap Perdagangkan 53 Paket  
Sabu”. Diunduh pada tanggal 20 Juli  
2016. Dari [http://polres  
banyuwangi.com](http://polres<br/>banyuwangi.com)

Indah (2015) “Pidato Presiden Joko Widodo  
didepan sidang MPR 2015”: diunduh  
pada tanggal 15 Desember 2015 dari  
[www.detiknews.com](http://www.detiknews.com)

Prasetya (2015). “Menuju Indonesia sebagai  
poros maritim dunia”. Diunduh pada  
tanggal 15 Desember 2015 dari  
[www.academia.edu](http://www.academia.edu)

Parikesit (2014) “Cara Jokowi Jadikan  
Indonesia Poros Maritim”. Diunduh  
pada tanggal 15 Maret 2016 dari  
[www.tempo.com](http://www.tempo.com).

Widianto (2013) “TNI AL Perketat  
Pengamanan Laut Selatan Jawa  
Timur”. diunduh pada tanggal 15  
Maret 2016. Dari [www.tempo.com](http://www.tempo.com)